YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Universitas Islam Riau

OLEH:

CAHYADI PURNAWAN
NPM: 127110273

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, "Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru". Penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak H. Dr. Moris Adidi Yogia, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau;
4. Bapak Drs. Parjiyana, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini;
5. Bapak Arief Rifai, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Bapak dan Ibu para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
8. Kedua orang tua yang tetap setia dan selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, April 2018
Penulis

Cahyadi Purnawan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **i**
PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **ii**
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI ..... **iii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 8

BAB II STUDY KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR **10**
A. Studi Kepustakaan 10
1. Konsep Administrasi 10
2. Konsep Organisasi 12
3. Konsep Manajemen 13
4. Konsep Pengawasan 15
B. Kerangka Pikiran 24
C. Hipotesis 25
D. Konsep Operasional 26
E. Operasional Variabel 27
F. Tenik Pengukuran 28

BAB III METODE PENELITIAN **30**
A. Tipe Penelitian 30
B. Lokasi Penelitian 30
C. Populasi dan Sampel 31
E. Jenis dan Sumber Data 32
F. Teknik Pengumpulan Data 33
G. Teknik Analisa Data 34
H. Jadwal Penelitian 35
I. Sistematika Penulisan 36

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **38**
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 38
B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 42

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56
A. Identitas responden..... 56
B. Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru..... 59
C. Hambatan dalam Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru..... 74

BAB VI PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 80

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	SPBU di Kota Pekanbaru	2
II.1	Konsep Operasional dan Operasioan Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	27
III.1	Daftar Populasi dan Sampel Penelitian	31
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	35
IV.1	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru.....	41
V.1	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
V.2	Distribusi Responden Berdasarkan Usia	57
V.3	Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
V.4	Tanggapan Responden Tentang Penetapan Standar Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	61
V.5	Tanggapan Responden Tentang Tindakan Pengukuran Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	65
V.6	Tanggapan Responden Tentang Tindakan Koreksi Terhadap Penyimpangan Distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	68
V.7	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	72

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	Proses Pengawasan.....	23
II.1	Kerangka Pikiran Tentang Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	25
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	46

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

CAHYADI PURNAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan distribusi bahan bakar minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak oleg Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah survey deskripstif. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Populasi yang digunakan dalam penelitian berjumlah 49 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling., dalam penelitian ini penulis tetapkan sebanyak 28 orang. Sampel terpilih kemudian lebih lanjut ditetapkan sebagai responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengawasan distribusi bahan bakar minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berada dalam kategori cukup terlaksana. Sesuai dengan teknik pengukuran yang ditetapkan bahwa 34 % - 66 % dikatakan cukup terlaksana. Artinya indikator yang digunakan belum terlaksana semuanya dengan baik. Hambatan yang terjadi dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak oleg Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah kuantitas atau jumlah sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan masih kurang.

Kata Kunci: Pengawasan, Distribusi, Bahan Bakar Minyak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SUPERVISION OF DISTRIBUTION OF OIL FUEL BY DEPARTMENT OF INDUSTRY AND COMMERCE IN KOTA PEKANBARU

ABSTRACT

CAHYADI PURNAWAN

This study aims to determine the supervision of the distribution of fuel oil by the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City and find out the obstacles that occur in monitoring the distribution of fuel oil by the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City. The method of this research is descriptive survey. This research is located in the Office of Industry and Trade of Pekanbaru City. The population in this study was 49 people. The sampling technique in this study using purposive sampling technique, the sample in this study the authors set as many as 28 respondents. The result of the study show that supervision of oil fuel distribusion by the departemen of industry and trade of Pekanbaru City in the in the fairly implemented category. This conclusion is in accordance with the predetermined measurement technique that what is said to be a sufficiently implemented category is in the percentage of 34% - 66%, meaning that all three indicators used have not all been implemented properly .Constraints in supervising the distribution of fuel oil by the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City is limited human resources in conducting supervision .

Keywords: Supervision, Distribution, Oil Fuel.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan tempat seseorang melakukan aktivitas dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sesuai dengan misi yang telah ditentukan, sehingga misi akan tercapai dengan baik sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Arti organisasi dapat dicermati dari defenisi berikut ini.

> Organisasi adalah bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 2007;6).

Guna mengatur bagaimana unsur-unsur organisasi mampu mencapai tujuan organisasi dengan maksimal maka diperlukan cara yang dikenal dengan administrasi. Administrasi dalam arti luas adalah mencakup keseluruhan proses kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah yang telah disepakati sebelumnya (Zulkifli, 2005;17). Sedangkan Siagian (2003;18) mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Setelah adanya aktifitas administrasi dalam suatu organisasi, tentu diperlukan manajemen sebagai alat untuk mengatur dan mengelolah segala sumber daya dalam suatu organisasi (manusia, uang, mesin, aturan, peralatan, pasar atau pabrik) sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efesien.

Menurut Zulkifli (2005:28) yang mengutip pendapat The Liang Gie mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar benar-benar tercapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kota Pekanbaru, maka dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanabaru bertugas melaksanakan sebahagian urusan pemerintah daerah Kota dalam bidang perindustrian dan perdagangan, yang tertuang di bagian Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi, salah satu tugas melakukan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari terminal BBM/depot tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT. Pertamina (persero) ke SPBU sampai konsumen akhir di wilayah kota Pekanbaru.

SPBU yang beroperasi menyalurkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru saat ini terdapat sekitar 46 SPBU.

Tabel 1.1 SPBU di Kota Pekanbaru.

No	Nama Perusahaan	Bentuk Penyalur	Alamat
1	**2**	**3**	**4**
1	PT. Abdi Bina Karya Sembada	SPBU 14.2826117	Jln. Subrantas, Kota Pekanbaru
2	PT. Zulfan Nabila Mutiara Jaya	SPBU 14.282694	Garuda Km 1, Kota Pekanbaru
3	PT. Nadine Indah Cantika	SPBU 14.293651	Jl. Jend. Sudirman, Kota Pekanbaru
4	PT. Nadine Indah Cantika	SPBU 14.282610	Jl.K.L.Yos Sudarso Km.12 Lembah Damai, Kota Pekanbaru
5	PT. Mitratama Petrogas Nusantara	SPBU 14.282608	Jl. Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4
6	PT. Citra Wahana Perkasa	SPBU 14.2826115	Jl.Sembilang Rt.02/02 Kel.Limbungan, Kota Pekanbaru
7	PT. Sarana Aneka Usaha	SPBU 14.2826113	Lokasi Sidomulyo Timur, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru
8	PT. Rezki Putra Perkasa	SPBU 14.282682	Jl.Garuda Sakti Kec.Tampan, Kota Pekanbaru
9	PT. Yurizka Pratama Mandiri	SPBU 14.284653	Jl. Raya Pekanbaru Bangkinang, Kabupaten Kampar
10	PT. Perpama Indotara Abadi	SPBU 14.284689	Jl.Pasir Putih Pandau Jaya, Kota Pekanbaru
11	PT. Timur Senegeri Serumppun	SPBU 14.282627	Jl. Raya Kulim Km. 21, Kota Pekanbaru
12	PT. Grasia Rekatama	SPBU 14.282668	Jl. Imam Munandar Tangkerang, Kota Pekanbaru
13	PT. Bima Karya Agung	SPBU 14.286675	Jl. Karya Sari No.22 , Kota Pekanbaru
14	PT. Nur Emilia Akasah	SPBU 14.286613	Jl. Panglima Undan No. 75, Kota Pekanbaru
15	PT. Ripo Nengsih	SPBU 14.281669	Jl. Tg. Medang, Kota Pekanbaru
16	PT. Riau Rajawali Perkasa	SPBU 14.2826125	Jl. Hang Tuah,Kel. Rejosari, Kota Pekanbaru
17	PT. Viatikara	SPBU 14.282660	Jl. Kulim 57, Kota Pekanbaru
18	PT. Sinar Riau Andalan	SPBU 14.282618	Jl. T. Tambusai, Labuhan Baru Timur, Kota Pekanbaru
19	PT. Elge Hafil Perkasa	SPBU 14.282630	Jl. Imam Munandar No. 11, Kota Pekanbaru
20	PT. H & A Berkah Abadi Jaya	SPBU 14.282667	Jl. Hang Tuah, Kota Pekanbaru
21	PT. Farid Pratama Mandiri	SPBU 14.282635	Jl. Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru
22	PT. Pratama Bina Purna Sejahtera	SPBU 14.281609	Jl. Tanjung Batu No. 113 Pasisir Lima Puluh, Kota Pekanbaru
23	PT. Masa Jaya Lestari	SPBU 14.2846104	Jl. Bangkinagpetapahan Km.9, Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4
24	PT. Riau Bahtera Karya Sejahtera	SPBU 14.2826123	Jln. Delima Kel.Delima, Kota Pekanbaru
25	PT. Erin Perkasa	SPBU 14.281649	Jl. Diponegoro No.XI , Kota Pekanbaru
26	PT. Srikandi Bantera Melayu	SPBU 14.282625	Jl. Siak Ii Pekanbaru,Payung Sekaki, Tampan, Kota Pekanbaru
27	T. Petrolindo Sejati	SPBU 14.281629	Jl Durian No.88, Kota Pekanbaru
28	PT. Rimuindo	SPBU 14.282603	Jl. Jend. Sudirman No.468, Kota Pekanbaru
29	PT. Argudo Pormenos Sejahtera	SPBU 14.282685	Jl.Raya Sukarno Hatta, Kota Pekanbaru
30	PT. Ababil Delapan Belas	SPBU 14.281693	Jl. Ababil No. 18 Rt03 Rw04, Kota Pekanbaru
31	PT. Adlan Adham Mandiri	SPBU 14.281616	Jl. Yos Sudarso, Kota Pekanbaru
32	PT. Prima Putra Agung	SPBU 14.284623	Jl.Hr Soebrantas Kec. Panam , Kota Pekanbaru
33	PT. Prasepta Putra Salma	SPBU 14.282650	Jl. Kaharuddin Nasution, Kota Pekanbaru
34	PT. Karya Mandiri Sejahtera	SPBU 14.282683	Jl. Arengka Tampan, Kota Pekanbaru
35	PT. Bima Karya Agung	SPBU 14.282663	Jl. Sukarno Hatta Kec. Tampan, Kota Pekanbaru
36	PT. Mitra Riau Pradana	SPBU 14.282674	Jl. Soekarno Hatta No. 38, Kota Pekanbaru
37	PT. Indonas Siak Karya Sejahtera	SPBU 14.282648	Jl. Siak II Kel. Srimeranti Kec.Rumbai, Kota Pekanbaru
38	PT. Sumber Alam Jaya Permai	SPBU 14.282621	Jl. Jend.Sudirman Km.5,5 , Kota Pekanbaru
39	PT. Abdi Bina Karya Sembada	SPBU 14.2826117	Jln. Subrantas, Kota Pekanbaru
40	PT. Muara Siak Riau Sarana	SPBU 14.284697	Jl.Raya P.Barubangkinang, Kampar, Kota Pekanbaru
41	PT. Pembangunan Riau	SPBU 14.282620	Jl. Jend. Sudirman , Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4
42	PT. Sanur Jaya Prima	SPBU 14.282686	Jl. Siak II Kel. Srimeranti Kec.Rumbai, Kota Pekanbaru
43	PT. Mas Artha Sarana	SPBU 14.2826114	Jl.Riau Rt.03/02 Kel.Air Hitam, Kota Pekanbaru
44	PT. Riau Sumber Lestari	SPBU 14.282636	Jl. Kenanga No. 100, Kota Pekanbaru
45	PT. Mitra Zarti Izzah Pratama	SPBU 14.282696	Jl. Raya Lintas Timur, Km 15 Kelurahan Kulim Atas, Kota Pekanbaru
46	PT. Sinar Riau Mandiri	SPBU 14.282133	Jl. Cempaka No. 5 Kel. Padang Bulan, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2018.

Pendistibusian Bahan Bakar Minyak akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat, apabila pendistribusain ini tidak sesuai akan menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan dan tindakan krinimal terhadap Bahan Bakar Minyak sehingga terjadi kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan melakukan pengawasan.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pendistribusian Bahan Bakar Minyak tepat pada sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pergerakan BBM yang stabil akan berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Tetapi sebaliknya, ketidakstabilan distribusi BBM akan berdampak munculnya gejolak ditengah masyarakat. Begitu juga dengan Kota Pekanbaru yang permintaan akan keperluan BBM meningkat tapi belum bisa terpenuhi, dikarena belum tepatnya metode pendistribusian BBM yang dilakukan. Banyak depot bayangan yang berjamuran. Agar penyaluran berjalan lancar, maka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diperlukan pengawasan yang didasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Riau No. 12 tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau dan Keputusan Gubernur Riau dalam Pasal 9 ayat 1 tentang pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:

a. Penyaluran/penjualan oleh penyalur BBM dan pemakaian oleh konsumen industri.
b. Kelancaran penyaluran dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pertamina atau badan usaha lainnya dan pemda setempat.
c. Realisasi harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Selanjutnya Pasal 16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Kegiatan Penyaluran BBM, adapun pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

a. BU-PIUNU wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan penyaluran BBM kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pengatur dan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 3 bulan sewaktu-waktu diperlukan.
b. Laporan mengenai kegiatan penyaluran BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: rekapitulasi volume pendistribusian perjenis BBM, sarana dan fasilitas penyaluran yang digunakan berikut kepemilikan dan kapasitasnya termasuk penambahan atau pengurangannya, kinerja penyalur dalam melakukan kegiatan penyaluran BBM.

Berdasarkan keteranga diatas, di ketahui bahwa pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Disperindag Kota Pekanbaru meliputi empat hal, yakni:

1. Pengawasan terhadap jumlah atau kuantitas atau kuota.

2. Pengawasan terhadap peruntukkannya atau sasaran atau penggunaannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pengawasan harga terhadap harga BBM di SPBU
4. Pengawasan terhadap distribusi (agen).

Namun, dalam pelaksanaannya selama ini proses pengawasan distribusi BBM yang dilakukan Disperindag Kota Pekanbaru dinilai belum optimal, karena masih kurangnya ketersediaannya atau stok BBM untuk konsumen publik, kurang tepatnya sasaran atau penggunaannya serta terlambatnya penyaluran BBM ke SPBU oleh pihak pertamina. Sedangkan pengawasan terhadap harga BBM yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, semua SPBU menjual BBM sesuai dengan harga eceran atau HET BBM yang ditentukan pemerintah.

Berdasarkan fenomena yang dinilai berdasarkan gejala-gejala sementara, maka peneliti menarik kesimpulan sementara sebagai berikut:

1. Alokasi kuota BBM dirasakan kurang mencukupi ketersediannya baik jenis premium maupun solar di SPBU Kota Pekanbaru. Hal ini terbukti dengan adanya antrian panjang kendaraan di setiap SPBU.
2. Penggunaan BBM tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat golongan menengah ke atas memakai BBM bersubsidi, yang seharusnya memakai BBM non-subsidi (Pertama-X) setika melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pekanbaru.
3. Adanya keterlambatan pengiriman BBM dari depot pengisian ke SPBU di Pekanbaru. Keterlambatan pengiriman ini telah berakibat ketersediaan stok BBM di SPBU habis dan terjadi kepanikan warga Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: ”Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pengawasan distribusi BBM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

B. Kegunaan Praktis

1. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai reverensi dan dapat menambah koleksi data sekunder pada Progran Studi Administrasi Publik khususnya.
2. Menjadi data sekunder pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti berikutnya untuk meneliti lebih jauh tentang berbagai hal yang ada hubungan dengan penelitianya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial yang defenisinya tidak terbatas. Administrasi dalam arti luas dapat diartikan sebagai proses kegiatan atau usaha dalam melakukan pekerjaan oleh sekelompok orang secara terorganisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagai proses administrasi menggambarkan berjalannya suatu kegiatan kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan konsep administrasi dalam arti sempit yakni sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Menurut Hamim dan Indra Muchlis Adnan (2005;8-9), dalam literatur sampai saat ini, arti administrasi beraneka ragam, tergantung dari sudut mana ahli yang bersangkutan melihatnya. Beberapa pendapat tentang defenisi administrasi dari beberapa orang ahli, yaitu:

a. Leonard. D. White: Administrasi merupakan suatu proses kerjasama yang terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah maupun swasta, sipil maupun militer, skala besar maupun kecil.
b. James D. Mooney: Administrasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan.
c. Chester I. Bernard: Administrasi adalah suatu sistem tentang aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, sebagian besar mengenal hal hubungan-hubungan.

d. Ralp Cuuier Davis: Administrasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama dibawah kepimpinan.
e. Robert V. Presthhus: Adminsitrasi adalah suatu sistem susunan hubungan antar pribadi
f. Herleigh: Administrasi adalah perbuatan atau proses penghimpunan atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berhubungan dari instansi menjadi suatu keseluruhan yang bekerja.
g. H. A. Simon dkk: Administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.
h. William H. Newman: Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu-individu tercapainya tujuan bersama.

Menurut Siagian (2007;5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

> Secara teoritik pengertian administrasi melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa inggris "*administer*" yaitu kombinasi dari kata latin yang terdiri dari Ad dan Minisrare yang berarti "*to serve*" melayani, membantu dan memenuhi. Lebih jelas lagi kata Ad artinya intensif sedang Ministre berbentuk kata benda yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan (Sagala, 2007;40).

Atmosudirjo dikutip (Zulkifli, 2005;17) menyatakan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi tertentu.

Selanjutnya Zulkifli (2005;24) menyatakan:

> Administrasi bertitik tolak dari teoritas batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun luas (keseluruhan proses kerjasama), menunjukan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi organisasi, aspek-aspek yang dimaksud meliputi;
> a. Organisasi
> b. Manajemen
> c. Kepemimpinan
> d. Pengambilan keputusan
> e. Human Relation

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Informasi
g. Sumber Daya

Dengan demikian administrasi adalah proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *orgonon* dan istilah latin *organum* yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Menurut Sarwoto (dalam Zulkifli, 2005;134) organisasi adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Gitosudarmo (2000;1) organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Gomes (2003;23) organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang di pergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa yang dapat dipasarkan.

Selanjutnya menurut Siagian (2003;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/ sekelompok orang yang disebut bawahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Konsep Manajemen

Manajemen adalah kegiatan dengan melalui orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara berurutan berjalan kearah satu tujuan. Stoner, et.al dalam (Zulkifli, 2005:28) mengatakan, manajemen adalah proses merencanakan, memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dsera menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam menjalankan organisasi, pimpinan harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Fungsi-fungsi manajemen menurut Terry dan Lislie. W Rue (2000;9) yaitu:

1. Perencanaan
2. Organisasi
3. Kepegawaian
4. Motivasi
5. Pengawasan

Fungsi manejemen menurut The Liang Gie dalam (Zulkifli, 2005;28) yaitu:

1. Perencanaan
2. Pembuatan keputusan
3. Pengarahan
4. Pengorganisasian
5. Pengawasan
6. Penyempurnaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan pendapat diatas, diketahui bahwa salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk menjamin dan menilai bahwa kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan

Dalam kehidupan organisasi manajemen sangat dibutuhkan, dengan tiga alasan pokok sebagaimana dikemukakan Siagian (2003;12) berikut:

a. Untuk mencapai tujuan organisasi.
b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sararan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, serikat kerja, asosiasi perdagangan masyarakat dan pemerintah.
c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Manajemen berarti memimpin, mengatur dan membimbing. Secara tegas didefenisikan oleh Winardi (2004;4) dengan mengutip pendapat Terry, menyatakan bahwa "manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain."

Manajemen dapat dipandang sebagai fungsi, peranan maupun keterampilan. Reksohadiprodjo (2000;13) menguraikan lebih lanjut manajemen sebagai fungsi meliputi usaha perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan. Manajemen sebagai peranan adalah antar pribadi pemberi informasi dan pengambil keputusan. Manajemen dapat pula berarti pengembangan ketrampilan yaitu teknis, manusiawi dan konseptual.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dapat dipahami, manajemen memiliki arti penting bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Diperlukan kecakapan dan ketrampilan dari mereka yang dapat merencana, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi yang diharapkan secara efektif dan efisien, karena manajemen mencakup berbagai kegiatan yang dapat dioperasionalkan di dalam organisasi.

4. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting. Pengawasan merupakan fungsi yang terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Menurut pendapat Swastha dan Sukotjo (2000; 125) "Dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencana, serta melakukan perbaikan-perbaikan bila terjadi penyimpangan."

Setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi apapun selama menginginkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, maka pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen memegang peranan penting yang harus direalisasikan oleh pimpinan secara langsung dan kontinyu. Rifa'i (2001;11) menyatakan "dengan pengawasan dapat dipastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana, melalui pengawasan yang seksama dapat dikemukakan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya."

Pengawasan atau *controlling* menurut Sujamto (2000; 19) "segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak."

Ndraha (2003; 200) mengatakan, pengawasan dilakukan sebelum terjadi dan bukan setelah terjadi, sehingga pengawasan itu bersifat preventif. Sujamto (2002:19) mengatakan, "pengawasan adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak."

Siagian (2003:112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

Berdasarkan serangkaian batasan di atas, terlihat bahwa pengawasan memiliki konsekuensi membandingkann antara rencana yang telah disusun dengan hasil yang dapat diraih organisasi tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi harus diingat, tujuan pengawasan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan melainkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Pengawasan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan, penuyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Adapun tujuan pengawasan menurut Handayaningrat (2001;143) adalah "agar hasil pelaksanaan pekerjaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diperoleh secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses pengawasan yang dilaksanakan itu memiliki peranan membantu tercapainya efektivitas usaha-usaha yang sudah direncanakan sebelumnya, karena tidak ada tujuan yang berhasil dengan sendirinya melainkan terjalin oleh tiga langkah yang bersifat universal menurut Salindo (2000;27), yaitu:

a. Pengukuran hasil pekerjaan
b. Pembandingan hasil pekerjaan dengan standar dan melakukan perbaikan.
c. Koreksi terhadap penyimpangan.

Selanjutnya proses pengawasan menurut Anthony (dalam Reksohadiprodjo, 2000:66) adalah "proses dengan mana manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan dapat dimaklumi sebagai proses pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksaan tugas-tugas di lapangan sehingga dapat diketahui setiap permasalahan maupun kendala yang dihadapi bawahan. Ini berarti, proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan agar tercapai sasaran yang diharapkan. Konsepsi rumusan proses pengawasan dikemukakan oleh Winardi (2000; 96) sebagai berikut :

a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan
b. Meneliti hasil yang dicapai.
c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, menetapkan perbedaannya (bila ada perbedaan).
d. Memperbaiki penyimpangan dengan tidakan-tindakan korektif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Harahap (2004; 16) “sistem pengawasan merupakan keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang manajer untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya untuk mencapai keseluruhan visi, misi dan tujuan organisasi”.

Pentingnya pengawasan didasarkan atas perubahan yang sering terjadi di dalam organisasi sehingga membutuhkan perencanaan pengawasan yang baik, serta kompleksitas organisasi dan peluang kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Proses pengawasan menurut Anthony (dalam Reksohadiprodjo, 2000;66) adalah “proses dengan mana manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Belkaoui (dalam Harahap, 2004;37) menyatakan langkah-langkah umum yang diikuti dalaam proses pengawasan ini adalah :

a. Penyusunan tujuan.
b. Penetapan standar.
c. Pengukuran hasil kerja.
d. Perbandingan fakkta dengan standar.
e. Perbaikan/tindakan koreksi.

Menurut Manullang (2002:184) pengawasan itu mempunyai beberapa proses, yaitu:

1. Menetapkan alat ukur (standar)
2. Standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaanya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang digunakan untuk menilai pekerjaannya. Secara garis besar standar dapat digolongkan sebagai berikut:
   a. Standar dalam bentuk fisik adalah standar yang digunakan untuk menilai dan mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak dalam bentuk uang, seperti kualitatif dan kuantitatif serta waktu.

b. Standar dalam bentuk uang adalah standar yang digunakan untuk menilai hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang seperti biaya yang dikeluarkan.
c. Standar *intangible* adalah standar yang diukur dalam bentuk fisik dan mata uang.

3. Mengadakan penilaian yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Mengadakan perbaikan yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Kadarman dan Udaya (2001;161) proses pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan standar
2. Mengukur kinerja
3. Memperbaiki penyimpangan

Menurut Handoko (2003;; 363) tahap pengawasan terdiri dari:

1. Menetapkan standar dan pelaksanaan
2. Penentuan ukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi.

Menurut Brantas (2009; 197) sifat dan waktu pengawasan dibedakan atas:

1. Pengawasan sebelum kegiatan dilakukan (*preventif control*)
2. Pengawasan setelah terjadi kesalahan (*represive control*)
3. Pengawasan saat proses dilakukan, jika ada kesalahan segera diperbaiki.
4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala.
5. Pengawasan yang dilakukan secara mendadak
6. Pengawasan yang dilakukan secara integratif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian menurut Terry dan Rue (2000:12) prinsip pengawasan ada lima yaitu :

1. Tetapkan ukuran-ukuran
2. Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran
3. Perbaiki penyimpangan-penyimpangan
4. Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi
5. Berhubungan selalu selama proses pengawasan

Dari kelima prinsip pengawasan menurut Terry dan Rue dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Tetapkan ukuran-ukuran atau standar pengawasan adalah ketentuan dasar yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pekerjaan atau produk yang dihasilkan. Standar harus jelas, logis, wajar, tidak muluk, dan objektif.

b. Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran adalah pengamatan pekerjaan yang berjalan dalam pelaksanaan kegiatan rencana yang dilakukan dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.

c. Perbaiki penyimpangan-penyimpangan atau koreksi adalah langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kesalahan, juga memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang menjadi penyimpangan.

d. Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi adalah bagaimana merubah atau menyesuaikan cara pengawasan yang dilakukan sesuai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan keadaan seberapa jauh penyimpangan yang telah terjadi dari setandar dan rencana serta sebab-sebab penyimpangan.

e. Berhubungan selalu selama proses pengawasan adalah adanya koordinasi dengan kontak langsung antar manusia yang berkepentingan.

Tujuan utama dari pengawasan ialah agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karna itu agar sistem pengawasan benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana (Manulang, 2002 :174)

Dalam melaksanakan suatu tugas tertentu selalu terdapat urutan atau tahapan pelaksanaan tugas. Demikian pula dengan pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Tahap-tahap tersebut seperti diungkapkan oleh Handoko (2003:363) yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar II.1 Proses Pengawasan

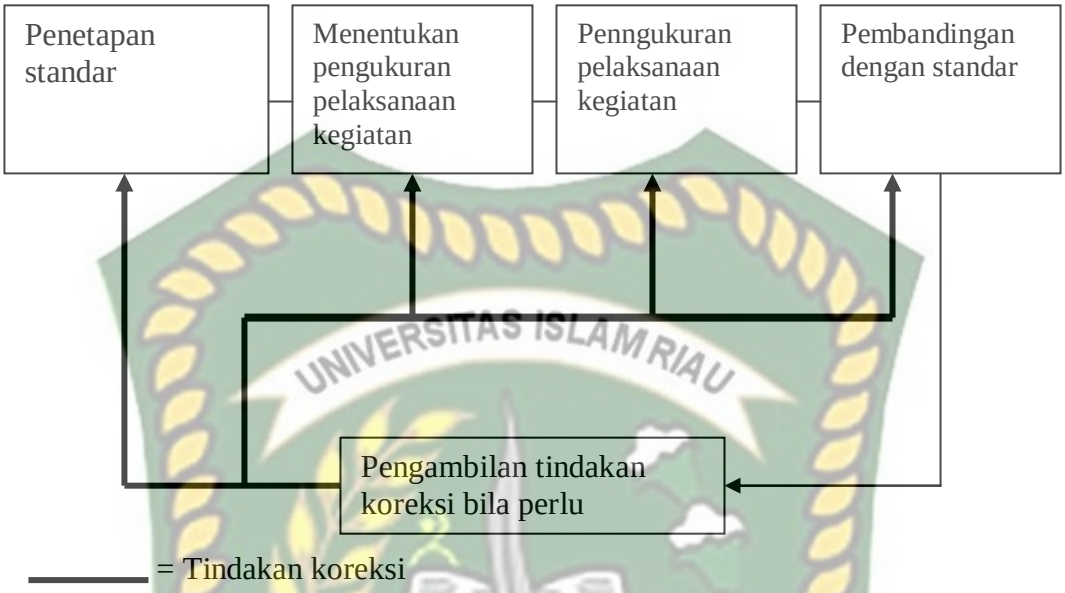

Sumber: Handoko (2003:363)

Menurut Siagian (2004:128) pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Yang dimaksud dengan proses dasar itu, ialah:

1. Penentuan standar hasil kerja
2. Pengukuran hasil pekerjaan
3. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Dari ketiga proses dasar pengawasan menurut Siagian (2004: 128-129) tersebut, dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penentuan standar hasil kerja. Standar terlebih dahulu harus ditetapkan. Ini tidak lain suatu model atau suatu ketentuan yang telah diterima bersama atau yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Standar berguna antara lain sebagai alat pembanding didalam pengawasan, alat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau sesuatu hasil telah dilaksanakan.

Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting ditentukan karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan di uji. Tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan objektif, manajer dan para pelaksana tidak akan mempunyai kriteria terhadap mana hasil pekerjaan dibandingkan sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntutan rencana atau tidak.

2. Pengukuran hasil pekerjaan. Ini dapat dilakukan dengan melalui antara lain: laporan (lisan atau tertulis), buku catatan harian tentang itu tentang bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survei yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu.
3. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi maksudnya perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. (Siagian, 2004:129).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Kerangka Pikiran.

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang digunakan peneliti sebagai landasan pemahaman tentang penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran yang peneliti lakukan di jelaskan dalam bentuk bagan-bagan, yang dapat memudahkan pemahaman tentang tata cara dan proses dalam melakukan pengawasan tersebut.

Berdasarkan teori yang dikemukan Siagian (2004:128) tentang proses pengawasan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran seperti Gambar II. 2 berikut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar II.2 Kerangka Pikiran Tentang Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

.

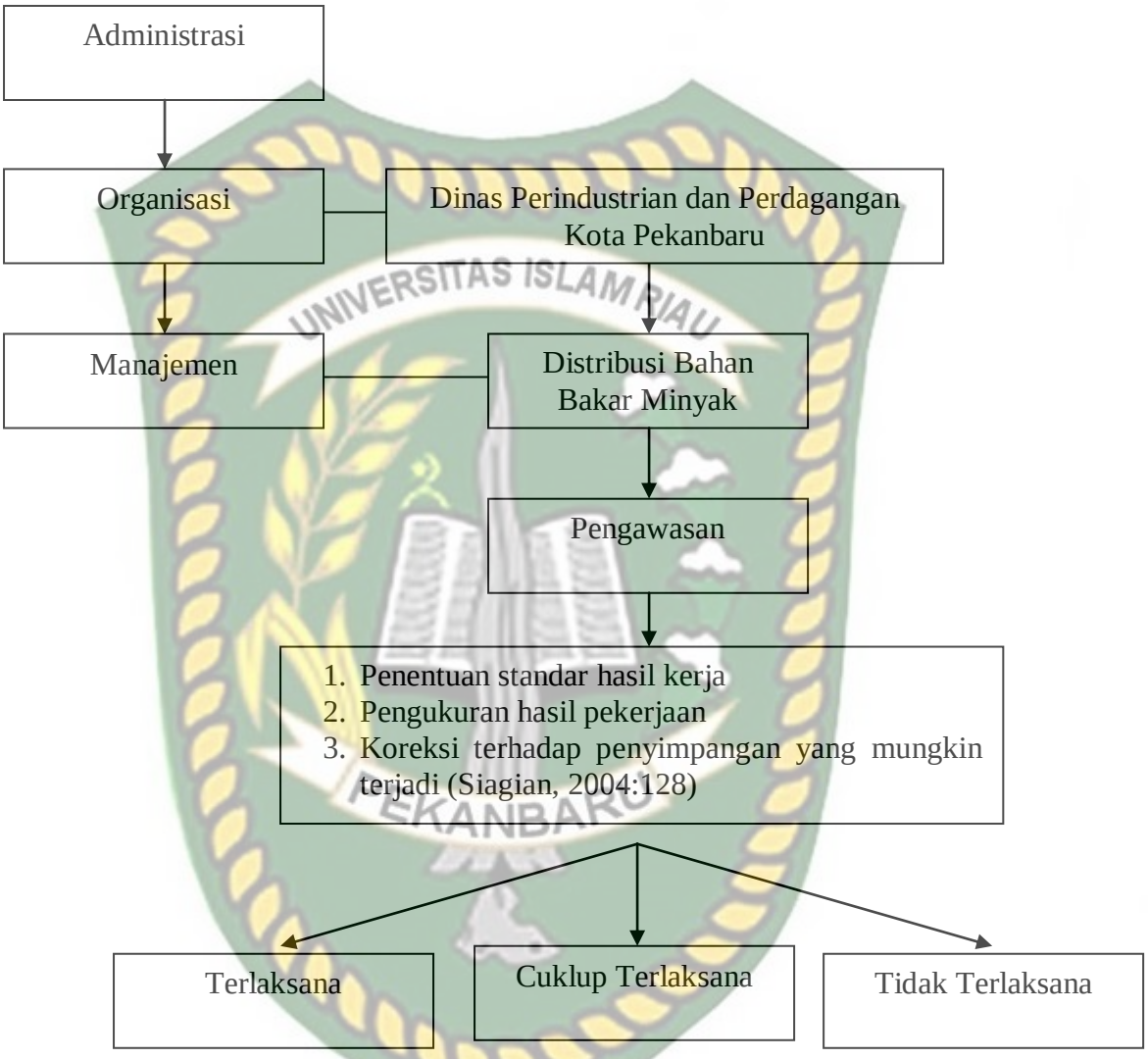

Sumber: Modifikasi penelitian, 2018

C. Hipotesis

Hipotesis yang penulis kemukan dalam penelitian ini adalah: "Diduga pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini adalah defenisi-defesi terhadap konsp yang digunakan, yaitu:

1. Administrasi yaitu keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyetujukan aktifitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.
4. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Penentuan standar adalah penentuan satuan pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil dari suatu pekerjaan.
6. Pengukuran hasil pekerjaan. Ini dapat dilakukan dengan melalui antara lain: laporan (lisan atau tertulis), buku catatan harian tentang itu tentang bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survei yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi adalah tindakan memperbaiki terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

E. Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari satu variabel. Adapun variabelnya adalah pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru. Penjabaran variabel dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut.

Tabel II.1 : Konsep Operasional dan Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, selaras dengan standar (ukuran). (Terry dan Rue 2000 : 162)	Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak	a. Penentuan standar hasil kerja	1. Penetapan standar pengawasan 2. Melakukan penilaian 3. Kuantitias pengawasan	Ordinal
		b. Pengukuran hasil pekerjaan	1. Standarisasi mendapatkan izin distribusi BBM 2. Korelasi data dengan kondisi dilapangan 3. Melaksanakan pemeriksaan	Ordinal
		c. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi	1. Peringatan lisan 2. Peringan tertulis 3. Pemberian sanksi	Ordinal

Sumber: Modifikasi penelitian, 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Teknik Pegukuran

Teknik pengukuran variabel pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah:

a. Penetapan standar pengawasan distribusi BBM oleh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, pengukurannya adalah:

   Terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel adalah > 67% artinya semua item yang dinilai dapat dilaksanakan.

   Cukup terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel adalah 34% - 66% artinya dua dari tiga item yang dinilai dapat dilaksanakan

   Kurang terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel adalah < 33% artinya tidak ada satupun item yang dinilai dapat dilaksanakan.

b. Penentuan pengukuran hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, pengukurannya:

   Terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel adalah > 67% artinya semua item yang dinilai dapat dilaksanakan.

   Cukup terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel adalah 34% - 66% artinya dua dari tiga item yang dinilai dapat dilaksanakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kurang terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel adalah < 33% artinya tidak ada satupun item yang dinilai dapat dilaksanakan

c. Koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan kegiatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, pengukurannya:

Terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel adalah > 67% artinya semua item yang dinilai dapat dilaksanakan.

Cukup terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel adalah 34% - 66% artinya dua dari tiga item yang dinilai dapat dilaksanakan

Kurang terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel adalah < 33% artinya tidak ada satupun item yang dinilai dapat dilaksanakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

MEATODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk penelitian tipe *survey deskriftif*, yakni menggambarkan kenyataan yang di temui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Disperindag Kota Pekanbaru, dengan menggunakan analisa *kuantitatif* melalui pengambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi. Penelitian survey adalah menelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dari responden yang biasanya menggunakan kuisioner (Iskandar, 2008:66).

B. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dimaksdukan untuk membatasi daerah dari variable-variabel yang diteliti (Usman, 2009;41). Penelitian ini berlokasi di Disperindag Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena adanya indikasi bahwa proses pengawasan distribusi BBM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dinilai belum optimal, karena masih kurangnya ketersediaannya atau stok BBM untuk konsumen publik, kurang tepatnya sasaran atau penggunaannya serta terlambatnya penyaluran BBM ke SPBU oleh pihak pertamina.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen yang menjadi objek penelitian. Menurut Iskandar (2005:69) sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati. Populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. III.1: Daftar Popoulasi dan Sampel Penelitian.

No.	Sub Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Dinas Disperindag Kota Pekanbaru	1	1	100 %
2	Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru	1	1	100 %
3	Manajer PT. Pertamina Region I BBM Ritel Pekanbaru	1	1	100 %
4	Pemilik SPBU	46	25	54 %
Jumlah		**49**	**28**	**57 %**

Sumber: Olahan penelitian, 2018.

D. Tenik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel Kepala Dinas dan Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Disperindag Kota Pekanbaru dilakukan dengan teknik sensus. Sedangkan teknik pengambilan sampel pemilik SPBU menggunakan teknik *purposive sampling*, sampel dalam penelitian ini penulis tetapkan sebanyak 28 responden. Menurut Sugiyono (2010:82) teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dari 28 responden tersebut 3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang responden yaitu: Kepala Dinas, Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru Disperindag Kota Pekanbaru Manajer PT. Pertamina Region I BBM Ritel Pekanbaru pengambilan data melalui wawancara, sedangkan 25 orang pemilik SPBU pengambilan data melalui kuisioner.

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Iskandar (2008:252) data primer data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden tentang pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008:253), data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, refernsi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relefansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku dan dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian, serta data-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya, yaitu berupa:

- Gambaran Umum Kota Pekanbaru.
- Sejarah singkat berdirinya Disperindag Kota Pekanbaru, struktur organisasi Disperindag Kota Pekanbaru, tugas pokok dan fungsi Disperindag Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara, menurut Riduwan (2009:29) wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait seperti Kepala Dinas, Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru dan Manajer PT.Pertamina Region I BBM Ritel Pekanbaru dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru.

b. Kuisioner, menurut Usman (2009:57) kuisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan disebarkan kepada pemilik SPBU yang terpilih menjadi responden untuk diisi berdasarkan alternatif jawaban yang ada. Alasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diberikan pada pemilik SPBU karena jumlahnya yang besar dan tidak bisa dilakukan wawancara secara langsung secara satu persatu.

c. Observasi, menurut Usman (2009:52) teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari dinas terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.

d. Studi Dokumentasi, menurut Riduwan (2009:31), studi dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Arikunto (2006:235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Dalam penelitian ini, setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mengelompokan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh dari hasil kuisioner akan dijelaskan mengggunakan tabel persentase. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan dijelaskan menggunakan uraian kalimat kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang didapat dari data sekunder, kemudian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diambil suatu kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan antara kondisi pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang seharusnya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

H. Jadwal Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Keterangan	Bulan dan Minggu Tahun 2018															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan UP																
2	Seminar UP																
3	Perbaikan UP																
4	Perbaikan Kuisioner																
5	Pengurusan Rekomendasi Penelitian																
6	Penelitian Lapangan																
7	Penelitian dan Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Penelitian																
9	Konsultasi Penelitian																
10	Ujian Skripsi																
11	Repisi dan Pengesahan Skripsi																
12	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian di atas adalah sebagai berikut ;

BAB I ; PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II ; STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul usulan penelitian. Bab ini juga terdiri dari kerangka pikir, rumusan hipotesis, konsep operasional, operasional variabel dan teknik pengukuran.

BAB III ; METODE PENELITIAN

Adalah bagian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji hipotesis, jadwal kegiatan penelitian, rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV ; DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi penelitian.

BAB V ; HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI ; PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang mengambil beberapa kesimpulan dan mencoba memberikan saran-saran sebagai sumbangan dari pemecahan masalah yang dihadapi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Berdasarkan sejarahnya, kota Pekanbaru hanyalah sebuah dusun kecil yang dikenal dengan dusun senapelan yang dipimpin oleh seorang kepala dusun yang disebut Batin. daerah ini dulunya adalah sebuah ladang yang semakin lama semakin berkembang dan menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan itu berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut dusun payung sekaki yang terletak ditepi muara sungai Siak. Nama payung sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan senapelan.

Perkembangan senapelan berhubungan erat dengan perkembangan erat dengan perkembangan kerajaan siak sri indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan. Beliau membangun istanananya dikampung bukit berdekatan dengan kampung senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar mesjid raya sekarang. Sultan tersebut mempunyai inisiatif membuat pekan di Senapelan namun hal itu tidak berkembang. Usaha yang telah dirintisnya itu dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan hasil musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan

Baharu". Sejak saat itu sebutan untuk Senapelan sudah ditinggalkan dan Pekan Baharu mulai dipopulerkan. Pekan Baharu akhirnya berubah menjadi Pekanbaru karena masyarakat lebih menggunakan kata Pekanbaru dalam bahasa yang digunakan sehari-hari. Dan oleh pemerintah daerah ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Riau.

2. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan. Adapun kecamatan yang ada di kota Pekanbaru adalah:

1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Payung Sekaki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Kecamatan Bukit Raya

4. Kecamatan Marpoyan Damai

5. Kecamatan Tenayan Raya

6. Kecamatan Lima Puluh

7. Kecamatan Sail

8. Kecamatan Pekanbaru kota

9. Kecamatan Sukajadi

10. Kecamatan Senapelan

11. Kecamatan Rumbai

12. Kecamatan Rumbai Pesisir

Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak;

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan;

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provisi Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pemerintahan

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 (dua belas) Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan.

3. Penduduk.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat. Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2016 berjumlah 787.776 jiwa yang terdiri dari 393.867 laki-laki dan 393.899 perempuan.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sukajadi	22.431	25.161	47.592
2	Pekanbaru Kota	14.969	15.679	30.648
3	Sail	11.257	11.432	22.689
4	Lima Puluh	21.822	20.578	42.400
5	Senapelan	17.708	16.750	34.458
6	Rumbai	29.405	27.306	56.711
7	Bukit Raya	40.116	39.036	79.152
8	Tampan	55.673	58.966	114.639
9	Marpoyan Damai	61.116	60.571	121.687
10	Tenayan Raya	52.999	51.164	104.163

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

11	Payung Sekaki	35.183	36.939	72.122
12	Rumbai Pesisir	31.188	30.317	61.505
Jumlah		**393.867**	**393.899**	**787.766**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2017.

B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

1. Sejarah

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain :

a. Tahun 1996

   Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya bernama Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Pekanbaru

b. Tahun 2001

   Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut. Selanjutnya pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan guna menunjang ekonomi kerakyatan.

b. Misi

1) Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata.
2) Menumbuh kembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab,
4) Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industri dan perdagangan.
5) Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat.
6) Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar/jasa serta perlindungan konsumen.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat di lihat di bawah ini :

1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2) Sekertaris
3) Kesekretariatan terdiri dari:
   a) Kepala Subag Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
   b) Kepala Subag Keuangan.
   c) Kepala Subag Penyusunan Program.
4) Bidang Perindustrian, terdiri dari:
   a) Kepala Bidang.
   b) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
   c) Kepala Seksi Usaha Perindustrian.
   d) Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi Industri.
5) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
   a) Kepala Bidang.
   b) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan.
   c) Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi.
   d) Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.
6) Bidang Kerjasama, terdiri dari:
   a) Kepala Bidang.
   b) Kepala Seksi Pengkajian dan Koordinasi.
   c) Kepala Seksi Kerjasama Perindustrian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d) Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan.

7) Bidang Pembinaan dan Perlindungan, terdiri dari :

a) Kepala Bidang

b) Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan.

c) Kepala Seksi Perlindungan Konsumen.

d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan.

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

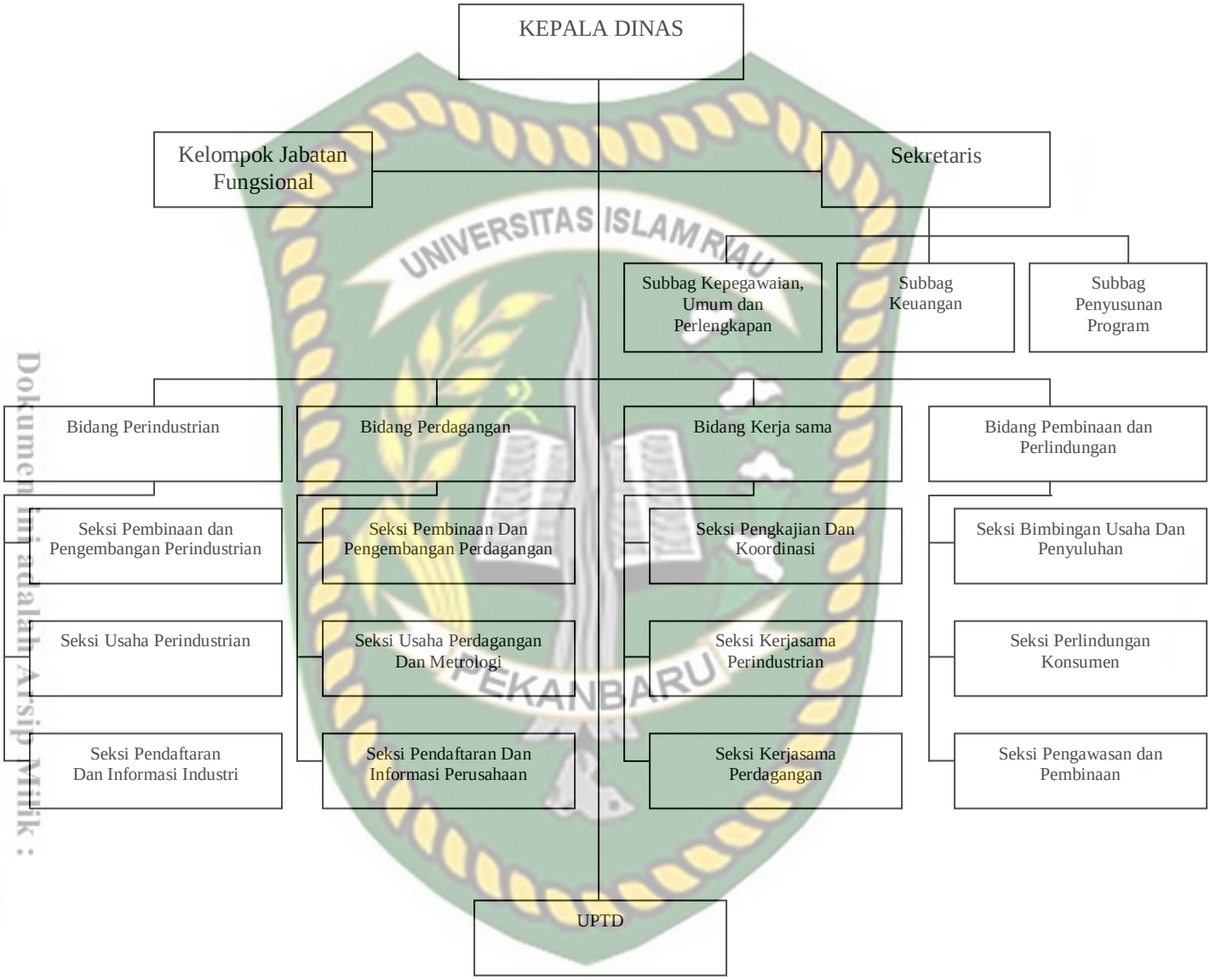

Sumber: Disperindag Kota Pekanbaru, 2018.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pekanbaru, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan
   a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru.
   b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok

   Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
3. Fungsi

   Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
   b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
   c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
   d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan barang dan jasa di bidang Industri dan Perdagangan.
b. Mendorong penyelenggaan barang kemitraan industri kecil, menengah, dan sektor ekonomi lainnya.
c. Penyelenggaraan perlindungan konsumen.
d. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
e. Pemberian izin industri dan kawasan industri.
f. Pemberian perizinan dibidang Industri dan Perdagangan, termasuk izin kawasan industri.
g. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengrajin.
h. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
i. Pengendalian pencemaran limbah industri.
j. Pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral.
k. Fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

l. Penetapan tera dan tera isi ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perdagangan.

m. Pemberian izin gudang.

n. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang.

o. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM).

p. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan Daerah.

q. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Industri dan Perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kota.

r. Penyusunan rencana Industri dan Perdagangan Daerah.

s. Perizinan di bidang Industri dan Perdagangan Daerah.

t. Penyelenggaraan ekspor dan impor hasil produk Industri dan Perdagangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

u. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa Industri dan Perdagangan.

v. Penyelenggaraan sistem Industri dan Perdagangan.

w. Penyelenggaraan promosi Industri dan Perdagangan.

x. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama Industri dan Perdagangan.

y. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Uraian tugas dan fungsi yang ada disetiap Bagian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

   Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berdasarkan asas Otonomi Daerah.

   Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

   a. Perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
   b. Perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan serta pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
   c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Bidang Perdagangan

   Subdin Perdagangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan peningkatan dan pengembangan kemampuan pengusaha, bimbingan terkait pengembangan ekspor - impor serta evaluasi pelaporan.

   Uraian tugas sebagai berikut :

   a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengetahuan kemampuan teknik manajemen pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan dan persaingan usaha serta standarisasi.
   b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan usaha pengembangan Ekspor dan Impor.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengarahan dan penyuluhan tyerhadap dunia usaha perdagangan dalam peningkatan mutu serta menunjang hasil produk usaha kecil dan menengah (UKM) supaya berorientasi ekspor.
d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan teknik pendidikan standar mutu kepada dunia perdagangan.
e. Mengkoordinasikan, membina dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha yang sehat, jujur dan memiliki kenyamanan.
f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengawasan terhadap perdagangan, kemetrologian, pendaftaran perusahaan serta evaluasi hasil kegiatan di bidang tersebut.
g. Mengkoordinasikan, membina serta melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bidang Perdagangan terdiri dari 3 seksi:

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan.
2) Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi.
3) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penetapan prosedur (Tata Laksana) pembinaan dan pengembangan serta menyediakan dukungan dan bantuan dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rangka menunjang kelancaran dan kerjasama khususnya perdagangan luar negri.

Uraian tugas sebagai beikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan pembinaan.
b. Memberikan dukungan dan bantuan kerjasama terhadap bimbingan dan informasi, fasilitas yang dibutuhkan bagi peningkatan dan pengembangan perdagangan terutama di bidang impor – ekspor.
c. Memberikan dukungan dan bantuan kerjasama terhadap pengendalian barang-barang impor.
d. Memberikan dukungan dan bantuan kerjasama terhadap upaya peningkatan barang-barang ekspor terutama pengembangan ekspor produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
e. Memberikan dukungan dan bantuan kerjasama dalam upaya pengawasan terhadap mutu barang – barang impor dan yang akan di ekspor.
f. Mempersiapkan, meneliti dan memproses terhadap permohonan penerbitan Angka Pengenal Impor (API) umum.
g. Mempersiapkan, meneliti dan memproses permohonan, pemberian, pencabutan Angka Pengenal Impor (API) umum.
h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi

Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan penyediaan barang dan stabilitas harga barang di pasar bebas (terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat), penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka menunjang kelancaran perdagangan dan Operasi Pasar di Kota Pekanbaru serta penyaluran pengawasan kemetrologian.

Uraian tugas sebagai berikut:

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas
b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi sebagai acuan dalam menjalankan tugas.
c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengadaan, penyaluran dan harga kebutuhan pokok dan barang strategis.
d. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka kelancaran pengadaan, penyaluran dan pemantuan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis.
e. Melakukan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha terutama Distributor/Pedagang Besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis dan memberikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rekomendasi guna penerbitan SIUP M-B, Keagenan/Distributor, Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) serta Berita Acara Pemeriksaan Gudang.

f. Merekapitulasi, menginformasikan serta melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan SIUP, TDP, Agen/Distributor, Asosiasi dan Gudang di Kota Pekanbaru.
g. Melakukan pengawasan dan penyaluran terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) serta melaksanakan tugas metrologi lain yang bekerjasama dengan Balai Metrologi Disperindag Provinsi Riau.
h. Memberikan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka melaksanakan Operasi Pasar bahan pokok dan barang penting
i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.

Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pendaftaran perusahaan

Uraian tugas sebagai berikut :

a. Memahami Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Memberikan dukungan, bantuan serta kerjasama terhadap upaya peningkatan pendaftaran perusahaan.
d. Memberikan dukungan dan bantuan terhadap sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan.
e. Mengolah, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan yang diterima dari laporan bulanan penerbit Tanda Daftar Perusahaan.
f. Menyediakan data tentang Wajib Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi.
g. Melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap perusahaan yang belum, sedang dan telah mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan UU No. 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Data diperoleh dari Disperindag Kota Pekanbaru, data selanjutnya akan dianalisis sesuai pokok pembasan yaitu mengenai pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru. Dari penyebaran kuesioner diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Selain itu diperoleh juga data tentang pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat distribusi frekuensi di bawah ini:

A. Identitas Responden

Responden di sini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian. Identitas responden sangat bermanfaat dalam penelitian, guna untuk mengetahui latar belakang responden. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian penulis mengemukakan identitas responden dari:

1. Jenis Kelamin Responden

Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya pada satu golongan yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada keadilan terhadap responden untuk member tanggapan/informasi kepada penulis lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	21	84 %
2	Perempuan	4	16 %
Jumlah		**25**	**100%**

Sumber : Hasil Penelitian 2018.

Berdasarkan tabel V.1 di atas di ketahui bahwa dari 25 responden sebanyak 21 orang atau 84 % adalah responden laki-laki, dan 4 orang atau 16 % adalah responden perempuan. Dengan sebagian besar responden dari pemilik SPBU di Kota Pekanbaru adalah laki-laki yang berjumlah 21 orang responden dan perempuan hanya berjumlah 4 orang responden.

2. Usia Responden

Tingkat umur responden yang dijadikan penelitian itu berbeda-beda. Hal ini berpengaruh kepada tingkat pemahaman terhadap informasi yang penulis dapatkan. Adapun tingkatan umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	18 – 25	1	4 %
2	26 – 35	8	32 %
3	36 ke atas	16	64 %
Jumlah		**25**	**100 %**

Sumber : Hasil Penelitian 2018.

Berdasarkan tabel V.2 di atas di ketahui bahwa responden yang berusia 18-25 tahun sebanyak 1 orang responden atau 4 % dari jumlah responden,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sedangkan responden yang berusia 26-35 tahun sebanyak 8 orang responden atau 32 % dari jumlah responden dan responden yang berusia 36 tahun ke atas sebanyak 16 orang responden atau sebanyak 64 % dari jumlah seluruh responden.

Dari data diatas dapat di lihat bahwa tingkat umur responden yang memberikan tanggapan sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapan terhadap pertanyaan dalam quisioner penelitian ini, sebab asumsi penulis adalah kedewasaan umur memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan jawaban yang tepat dan sesuai.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden itu sangat mempengaruhi terhadap jawaban responden. Karena pada dasarnya pemahaman dan pengetahuan itu sangat penting, tingkat pendidikan responden itu berbeda-beda antara satu dengan lain. Jika ada yang sama tingkat pendidikanya pun tidak sama daya pemahaman dan pengetahuan. Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	S1	11	44 %
2	SLTA	12	48 %
3	SLTP	2	8 %
Jumlah		**25**	**100%**

Sumber : Hasil Penelitian 2018.

Dari tabel V.3 di atas menunjukkan bahwa dari tingkat pendidikan responden sangat bervariasi untuk responden yang berpendidikan S1 sebanyak 11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang atau 44 %, yang berpendidikan SLTA sebanyak 12 orang atau 48 %, kemudian yang tingkat pendidikan SLTP sebanyak 2 orang atau 8 %.

B. Pengawasan Distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru.

Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Fungsi pengawasan dalam manajemen merupakan upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikasi dari setiap penyimpangan tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kota Pekanabru merupakan suatu instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsinya dalam mengatur dan mengawasi jalannya proses pendistribusian BBM di Kota Pekanbaru, selain pelaksanaan pengawasan, Disperindag Kota Pekanbaru juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan surat peringatan/sanksi kepada setiap pemilik SPBU yang tidak sesuai dengan aturan pendistribusian yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tindakan kecurangan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyimpangan yang dilakukan oleh Pertamina maupun pemiliki SPBU di Kota Pekanbaru demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru.

Penulis menetapkan tiga penilaian dari pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru, yaitu:

1) Penentuan standar hasil kerja
2) Pengukuran hasil pekerjaan
3) Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

1. Penentuan standar hasil kerja

Standar terlebih dahulu harus ditetapkan. Standar berguna antara lain sebagai alat pembanding didalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau sesuatu hasil telah dilaksanakan. Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting ditentukan karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan di uji. Tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan objektif, manajer dan para pelaksana tidak akan mempunyai kriteria terhadap mana hasil pekerjaan dibandingkan sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntutan rencana atau tidak.

Penulis menetapkan tiga penilaian dari penetapan standar hasil kerja distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Penetapan standar pengawasan
2. Melakukan penilaian
3. Kuantitias pengawasan

Untuk mengetahui bagaimana penetapan standar pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.4 Tanggapan Responden Tentang Penetapan Standar Pengawasan Distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1	Penetapan standar	6 (24 %)	12 (48%)	7 (28 %)	25 (100 %)
2	Melakukan penilaian	10 (40 %)	12 (48 %)	3 (12 %)	25 (100 %)
3	Kuantitas pengawan	5 (20 %)	10 (40 %)	10 (40 %)	25 (100 %)
Jumlah		**21**	**34**	**20**	**75**
Rata-rata		**7**	**11**	**7**	**25**
Persentase		**28 %**	**44 %**	**28 %**	**100 %**

Sumber: Olahan Penelitian 2018.

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator penetapan standar pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru yang dinilai pada item pertama yaitu penetapan standar pengawasan distribusi BBM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru sebanyak 6 orang atau 24 % mengatakan terlaksana, sebanyak 12 orang atau 48 % mengatakan cukup terlaksana, dan 7 orang atau 28 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara penetapan standar pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

Pada item kedua yaitu pelaksanaan penilaian berupa pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap distribusi BBM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru sebanyak 10 orang atau 40 % mengatakan terlaksana, sebanyak 12 orang atau 48 % mengatakan cukup terlaksana, sebanyak 3 orang atau 12 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan penilaian berupa pengawasan langsung dan tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

langsung terhadap distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

Pada item ketiga yaitu kuantitas kuantitas pengawasan terhadap jumlah kuota, peruntukan, harga dan agen distribusi BBM oleh Dinas Disperindag di Kota Pekanbaru sebanyak 5 orang atau 20 % mengatakan terlaksana, sebanyak 10 orang atau 40 % mengatakan cukup terlaksana dan 10 orang atau 40 % mengatakan tidak terlaksana, artinya responden menilai kuantitas pengawasan terhadap jumlah kuota, peruntukan, harga dan agen distribusi BBM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang penetapan standar hasil kerja distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 11 orang atau 44 % mengatakan cukup terlaksana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Disperindag Kota Pekanbaru tentang penetapan standar pengawasan distribusi BBM, diperoleh informasi bahwa:

> Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru menyusun terlebih dahulu standar pengawasan yang akan dilakukan sehingga setiap badan/SPBU/depot yang memiliki izin tetap pada peraturan tidak memberikan pembeli dalam jumlah besar terkecuali memiliki izin dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (hasil wawancara tanggal 10 September 2018)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru tentang penetapan standar pengawasan distribusi BBM, diperoleh informasi bahwa:

> Penetapan standar pengawasan distribusi BBM dilakukan untuk mengawasi ketersediaan pasokan BBM disetiap SPBU, hal ini untuk mengetahui apakah pasokan BBM yang di bawa oleh mobil-mobil pengangkut pertamina sampai ke SPBU sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pertamina. Pasokan BBM rentan terjadinya penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (hasil wawancara tanggal 10 September 2018)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer PT. Pertamina Region I BBM Ritel Pekanbaru tentang pihak yang berkewajiban mengawasi distribusi BBM, diperoleh informasi bahwa:

> Yang berkewajiban untuk mengawasi proses penyaluran adalah Pemerintah yaitu Disperindag Kota Pekanbaru. Sejauh ini pertamina bersama dengan beberapa pihak terkait juga sudah berusaha menindak tegas oknum-oknum yang berusaha menyelewengkan distribusi BBM dan juga SPBU-SPBU yang dinilai "nakal" (hasil wawancara tanggal 12 September 2018).

Dari hasil observasi penulis diketahui bahwa Dinas Perindutrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah menetapkan standar pengawasan pengawasan distribusi BBM, pengawasan dilakukan terhadap penyalur/penjualan oleh penyalur BBM dan pemakaian oleh konsumen industri. Kelancaran penyaluran dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pertamina atau badan usaha lainnya dan Pemerintah Daerah setempat dan realisasi harga, apakah sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau tidak.

Berdasarkan uraian dari data kuisioner, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka penulis menarik kesimpulan bahwa penetapan standar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru yang dinilai dari beberapa indikator yaitu: penetapan standar pengawasan, melakukan penilaian, kuantitias pengawasan sebagian item yang dinilai dapat digolongkan kedalam kategori cukup terlaksana.

2. Pengukuran hasil pekerjaan

Tindakan pengukuran hasil pekerjaan adalah kegiatan untuk pelaksanaan penilaian atas masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan penyaluran BBM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan terus menerus mengingat semakin banyak penyalur ataupun SPBU di Kota Pekanbaru sekarang ini.

Setelah petugas pengawas malakukan menetapkan standar hasil kerja maka Dinas Perindutrian dan Perdagangan selanjutnya melakukan tindakan pengukuran hasil pekerjaan. Penulis menetapkan tiga penilaian dari tindakan pengukuran distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Standarisasi mendapatkan izin distribusi BBM
2. Korelasi data dengan kondisi dilapangan
3. Melaksanakan pemeriksaan

Untuk mengetahui tindakan pengukuran distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V. 5 Tanggapan Responden Tentang Tindakan Pengukuran Distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1	Standarisasi mendapatkan izin distribusi BBM	4 (16 %)	16 (64 %)	5 (20 %)	25 (100 %)
2	Korelasi data dengan kondisi dilapangan	2 (8 %)	14 (56 %)	9 (36 %)	25 (100 %)
3	Melaksanakan pemeriksaan	3 (12 %)	19 (76 %)	3 (12 %)	25 (100 %)
Jumlah		**9**	**49**	**17**	**75**
Rata-rata		**3**	**16**	**6**	**25**
Persentase		**12 %**	**64 %**	**24 %**	**100 %**

Sumber: Olahan Penelitian 2018.

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator tindakan pengukuran distribusi BBM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru yang dinilai pada item pertama yaitu penetapan standarisasi izin distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru sebanyak 4 orang atau 16 % mengatakan terlaksana. Sebanyak 16 orang atau 64 % mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 5 orang atau 20 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap penetapan standarisasi izin distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru cukup terlaksana.

Pada item kedua yaitu pengawasan terhadap korelasi data distribusi BBM dengan kondisi dilapangan oleh Disperindag di Kota Pekanbaru sebanyak 2 orang atau 8 % mengatakan terlaksana. Sebanyak 14 orang atau 56 % mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 9 orang atau 36 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap pengawasan terhadap korelasi data

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

distribusi BBM dengan kondisi dilapangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

Pada item ketiga yaitu proses pemeriksaan distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru sebanyak 3 orang atau 12 % mengatakan terlaksana. Sebanyak 19 orang atau 76 % mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 3 orang atau 12 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap proses pemeriksaan distribusi BBM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbarur dalam kategori cukup terlaksana.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang tindakan pengukuran distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru sebanyak 16 orang atau 64 % mengatakan cukup terlaksana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Disperindag Kota Pekanbaru tentang penetapan standarisasi izin distribusi BBM, diperoleh informasi bahwa:

> Pembuatan standarisasi izin distribusi BBM adalah penetapan dalam memperjul belikan BBM Bersubsidi, yang mendapatkan izin dalam memperjual belikan BBM Bersubsidi yaitu Pertamina. Selain pertamina dapat dikatakan ilegal dalam hal memperjual belikan BBM Bersubsidi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 tahun 2002 tentang pembinaan dan pengawasan penyaluran BBM yang mengacu kepada UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (hasil wawancara tanggal 10 September 2018)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru tentang pengawasan terhadap korelasi data distribusi BBM dengan kondisi dilapangan, diperoleh informasi bahwa:

> Kami memeriksa data yang ada dengan keadaan rill dilapangan atau meninjau langsung Proses perniagaan di depot/SPBU/badan yang memiliki izin. Misalnya korelasi data mengenai pernyataan atau prosedur pembelian BBM Bersubsidi dengan jumlah besar apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan, pengecekan keakuratan Meteran pompa/ukuran SPBU dan pelanggaran lainnya (hasil wawancara tanggal 10 September 2018)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer PT. Pertamina Region I BBM Ritel Pekanbaru tentang bagaimana proses pemeriksaan distribusi BBM, diperoleh informasi bahwa:

> Proses pemeriksaan distribusi BBM dilakukan oleh petugas pengawas, dalam hal ini Disperindag Kota Pekanbaru, mereka mengawasi langsung proses pembelian BBM Bersubsidi dalam jumlah besar apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku misalnya pemeriksaan langsung surat izin yang dipergunakan perseorangan atau badan guna mendapatkan BBM sesuai kebutuhan (hasil wawancara tanggal 12 September 2018).

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa pengecekan terhadap SPBU/Depot yang dilakukan dinas Disperindag Kota Pekanbaru dengan membawa serta surat tugas yang diberikan kepala bagian pembinaan dan pengawasan. Yang turun kelapangan dalam pengawasan yaitu semua instansi bagian perdagangan dan metrologi yang beranggotakan 13 orang. Setelah melakukan pengecekan terhadap SPBU/Depot petugas pengawas membuat laporan hasil pengawasan, berdasarkan temuan-temuan berupa pelanggaran yang dijumpai pada penyalur/SPBU.

Berdasarkan uraian dari data kuisioner, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka penulis menarik kesimpulan bahwa tindakan pengukuran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

distribusi BBM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru yang dinilai dari beberapa indikator yaitu: standarisasi mendapatkan izin distribusi BBM, korelasi data dengan kondisi dilapangan, melaksanakan pemeriksaan sebagian item yang dinilai dapat digolongkan kedalam kategori cukup terlaksana.

3. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi maksudnya perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Penulis menetapkan tiga penilaian dari koreksi terhadap penyimpangan distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru, yaitu:

a. Peringatan lisan
b. Peringan tertulis
c. Pemberian sanksi

Bagaimana tindakan koreksi terhadap penyimpangan distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel V.6 Tanggapan Responden Tentang Tindakan Koreksi Terhadap Penyimpangan Distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1	Peringan lisan	2 (8 %)	13 (52 %)	10 (40 %)	25 (100 %)
2	Peringatan tertulis	4 (16%)	18 (72 %)	3 (12 %)	25 (100 %)
3	Pemberian sanksi	8 (32 %)	12 (48 %)	5 (20 %)	25 (100 %)
Jumlah		**14**	**43**	**18**	**75**
Rata-rata		**5**	**14**	**6**	**25**
Persentase		**20 %**	**56%**	**24 %**	**100 %**

Sumber: Olahan Penelitian 2018.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator tindakan koreksi terhadap penyimpangan distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru yang dinilai pada item pertama yaitu peringatan lisan yang dilakukan berupa teguran langsung kepada pihak penyalur BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru sebanyak 2 orang atau 8 % mengatakan terlaksana, sebanyak 13 orang atau 52 % mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 10 orang atau 40 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap peringatan lisan yang dilakukan berupa teguran langsung kepada pihak penyalur BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru berada pada kategori kategori cukup terlaksana.

Pada item kedua yaitu peringatan tertulis terhadap penyalur BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru sebanyak 4 orang atau 16 % mengatakan terlaksana. Sebanyak 18 orang atau 72 % mengatakan cukup terlaksana, dan sebanyak 3 orang atau 12 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap peringatan tertulis terhadap penyalur BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

Pada item ketiga yaitu pemberian sanksi terhadap penyalur BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru sebanyak 8 orang atau 32 % mengatakan terlaksana. Sebanyak 12 orang atau 48 % mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 5 orang atau 20 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap pemberian sanksi terhadap penyalur BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang tindakan koreksi terhadap penyimpangan distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 14 orang atau 56 % mengatakan cukup terlaksana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Disperindag Kota Pekanbaru tentang tindakan koreksi terhadap penyimpangan distribusi BBM, diperoleh informasi bahwa:

> Untuk dapat melaksanakan tindakan terhadap penyimpangan, maka pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis apa penyebab terjadinya penyimpangan sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, tindakan koreksi terhadap sebuah pelanggaran agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki, dan juga untuk menghindari kesalahan yang sama sesegera mungkin, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Setelah mendapatkan penyebab penyimpangan yang dilakukan maka barulah mengadakan tindakan perbaikan seperti pemberian surat peringatan ataupun pemberian sanksi yang tegas (hasil wawancara tanggal 10 September 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran distribusi BBM oleh pemilik SPBU, diperoleh informasi bahwa:

> Sanksi diberikan mulai dari kecil hingga besar seperti pencabutan izin usaha yang kemudian berimplikasi pada terhentinya kegiatan operasional SPBU. Dalam melaksanakan pengawasan kami sebelumnya menentukan jadwal yang akan ditentukan, terus kami menyurati yang berbentuk surat pemberitahuan ke pada permilik SPBU tersebut, dalam kunjungan, kami memonitoring serta mengukur ulang pompa mesin tersebut dan di akhiri dengan pembuatan berita acara pemeriksaaan. Dalam pengawasan tersebut kami melakukan setahun 4 kali dalam rentan waktu 3 bulan sekali, kami jarang melakukan sidak terhadap beberapa SPBU kecuali ada gejolak harga atau pas ada kenaikan harga BBM (hasil wawancara tanggal 10 September 2018).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sanksi kecil yang dimaksud adalah peringan secara lisan ataupun tertulis, diberikan apabila terjadi pelanggagaran secara terus menerus oleh penyalur BBM. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyalur BBM dasarnya sama yakni mau menghabiskan kuota penjualan mereka, tanpa sadar mereka melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa mereka tidak diperbolehkan menerima pembelian BBM kepada masyarakat yang menggunakan jerigen atau drum dengan jumlah besar karna masyarakat yang membeli dengan jumlah besar mereka termasuk orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau perniagaan BBM dari Pemerintah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer PT. Pertamina Region I BBM Ritel Pekanbaru tentang pemberian sanksi oleh Disperindag Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran distribusi BBM, diperoleh informasi bahwa:

> Pemberian sanksi oleh Disperindag Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran distribusi BBM biasanya berupa teguran maupun pembinaan kepada pihak yang melanggaran peraturan yang telah ditetapkan agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki, dan apabila dengan pemberian sanksi berupa teguran dan pembinaan ini tidak juga memperbaiki kesalahan yang dibuat maka pihak Dinas Perindustsrian dan Perdagangan akan memberi sanksi terberat yaitu berupa pencabutana izin (hasil wawancara tanggal 12 September 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilokasi penelitian terindikasi bahwa pencabutan izin sendiri belum pernah terjadi di Kota Pekanbaru khususnya untuk penyaluran BBM, hal ini ada dua kemungkinan yang terjadi di lapangan yakni belum adanya pelanggaran yang cukup memberatkan pihak penyalur sehingga pencabutan izin tidak perlu terjadi, kemungkinan kedua adalah belum adanya ketegasan Pemerintah dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada Penyaluran BBM. Hal ini disebabkan karena masi banyak pihak penyalur yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bebas memperjual belikan BBM kepada masyarakat yang membeli dengan jumlah besar dan diperjualkan kembali dengan harga yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, untuk itu perlu penanganan yang tegas dari pemerintah dengan menerapkan sanksi sesuai dengan Undang-undang.

Berdasarkan uraian dari data kuisioner, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka penulis menarik kesimpulan bahwa tindakan koreksi terhadap penyimpangan distribusi BBM oleh Disperindag di Kota Pekanbaru yang dinilai dari beberapa indikator yaitu: peringatan lisan, peringatan tertulis dan pemberian sanksi sebagian item yang dinilai dapat digolongkan kedalam kategori cukup terlaksana.

Dari analisa yang telah dilakukan diatas maka dapat ditarik rekapitulasi jawaban responden berikut ini:

Tabel V.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1	Penentuan standar hasil kerja	7 (28 %)	11 (44 %)	7 (28 %)	25 (100 %)
2	Pengukuran hasil pekerjaan	3 (12 %)	16 (64 %)	6 (24 %)	25 (100 %)
3	Koreksi terhadap penyimpangan	5 (20 %)	14 (56 %)	6 (24 %)	25 (100 %)
Jumlah		**15**	**41**	**19**	**75**
Rata-rata		**5**	**14**	**6**	**25**
Persentase		**20 %**	**56 %**	**24 %**	**100 %**

Sumber: Olahan Penelitian 2018.

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru yang dinilai pada item pertama yaitu penentuan standar hasil kerja diketahui sebanyak 7 orang atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

28 % mengatakan terlaksana. Sebanyak 11 orang atau 44 % mengatakan cukup terlaksana. Sebanyak 7 orang atau 28 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap penentuan standar pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

Pada item kedua yaitu tindakan pengukuran hasil pekerjaan diketahui sebanyak 3 orang atau 12 % mengatakan terlaksana. Sebanyak 16 orang atau 64 % mengatakan cukup terlaksana. Sebanyak 6 orang atau 24 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap tindakan pengukuran hasil pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

Pada item ketiga yaitu koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi diketahui sebanyak 5 orang atau 20 % mengatakan terlaksana. Sebanyak 14 orang atau 56 % mengatakan cukup terlaksana. Sebanyak 6 orang atau 24 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap koreksi terhadap penyimpangan pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

Dari analisa pada tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk keseluruhan indikator variabel pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru dapat dijelaskan bahwa rata-rata responden yang mengatakan terlaksana sebanyak 5 orang atau 20 %, yang mengatakan cukup terlaksana 14 orang atau 56 % dan yang mengatakan tidak terlaksana sebanyak 6 orang atau 24 %.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 14 orang atau 56 % mengatakan mengatakan cukup terlaksana. Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru berada dalam kategori cukup terlaksana. Kesimpulan ini sesuai dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori cukup terlaksana berada pada persentase 34 % - 66 %, artinya dari tiga indikator yang dipakai belum semua terlaksana dengan baik.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru tentang kendala dalam melakukan pengawasan distribusi BBM, diperoleh informasi bahwa:

> Kami sangat kekurangan petugas dalam hal pengawasan. Maka dari itu setiap melakukan tugas kami cuma bisa membuat 1 (satu) tim pengawasan saja, penambahan petugas sangat kami nantikan, karena dapat menunjang kinerja kami dalam setiap pengawasan. Yang lebih penting lagi di setiap petugas yang baru diharapakan memahami setiap seluk-beluk pengawasan distribusi BBM (hasil wawancara tanggal 10 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara ditas, diketahui bahwa hambatan dalam melakukan pengawasan distribusi BBM di Kota Pekanbaru adalah terbatasnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan. Pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru hanya terdiri dari 1 (satu) tim pengawasan dan harus mengawasi seluruh agen penyalur BBM/SPBU yang ada di Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa alokasi kuota BBM dirasakan kurang mencukupi ketersediannya baik jenis premium maupun solar di SPBU Kota Pekanbaru. Hal ini terbukti dengan adanya antrian panjang kendaraan di setiap SPBU. Penggunaan BBM tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat golongan menengah ke atas memakai BBM bersubsidi, yang seharusnya memakai BBM non-subsidi (Pertama-X) setika melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pekanbaru. Adanya keterlambatan pengiriman BBM dari depot pengisian ke SPBU di Pekanbaru. Keterlambatan pengiriman ini telah berakibat ketersediaan stok BBM di SPBU habis dan terjadi kepanikan warga Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru berada dalam kategori cukup terlaksana. Kesimpulan ini sesuai dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori cukup terlaksana berada pada persentase 34 % - 66 %, artinya dari tiga indikator yang dipakai belum semua terlaksana dengan baik. Kendala dalam melakukan pengawasan distribusi BBM oleh Disperindag Kota Pekanbaru adalah terbatasnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Disperindag Kota Pekanbaru, diharapkan untuk dapat melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap distribusi BBM secara berkelanjutan. Sehingga, pengawasan dapat berjalan secara efektif.
2. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru selaku kuasa tertinggi di Kota Pekanbaru untuk dapat memberikan dan menambahkan Sumber Daya Manusia Disperindag Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Kepada agen/penyalur BBM, diharapkan tidak menutup-menutupi ketika terjadi pengawasan, sehingga petugas jadi lebih mudah dalam menjalankan tugasnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Jakarta. Rineka Cipta.

Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Alfabeta.

Gitosudarmo, 2000. *Prilaku Keorganisasian*. Yogyakarta, BPFE.

Handayaningrat, Soewarno. 2001, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, CV. Haji Masagung.

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*, Yogyakarta, BPFE.

Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan, 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta, Multi Grafindo.

Harahap, Syafri Sofyan. 2004. *Sitem Pengawasan Manajemen*. Jakarta. Quantum.

Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta. Gaung Persada Press.

Kadarman, AM dan Jusuf Udaya, 2001, *Pengantar Ilmu Manajemen.* Jakarta, Prenhallindo.

Manullang,M. 2002. *Dasar-Dasar Manajeme.*, Medan, Gadjah Mada University Press.

Ndraha, Talizudu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru*), Jilid I. Jakarta, Rineka Cipta.

Reksohadiprojo, Sukanto, 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta, BPFE UGM.

Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung.

Rifa'i, M. Moh, 2001. *Administrasi dan Supervisor*. Seri Manajemen No. 62. Bandung, PT. Pustaka Binaman Pressindi.

Sagala, Syaiful, 2007. *Manajemen Strategik Dalam Peningkata Mutu Pendidikan*, Alpabeta. Bandung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Salindo, Jhon, 2000. *Pengawasan Melekat.* Jakarta, Bumi Aksara.

Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bumi Aksara. Jakarta.

_____, 2004. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.

_____, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. PT Gunung Agung.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.

Sujamto, 2000. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta, Galia Indonesia.

Terry, George R. dan Rue, Lisle W. 2000. *Dasar-Dasar Manejemen*. Jakarta. Bumi Aksara.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial. Edisi Kedua*. Jakarta. Bumi Aksara.

Winardi, 2000. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung, Mandar Maju.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru. Universitas Islam Riau Press.

B. Dokumentasi:

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Kegiatan Penyaluran BBM

Peraturan Pemerintah Provinsi Riau Nomor.12 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyalur Bahan Bakar Minyak

Perda Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kota Pekanabru.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Hasil Penelitian, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :